

PENGARUH *TUDANG SIPULUNG*, PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN PADA PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG

Muhammad Aryan¹, Yadi Arodhiskara², Jumriani³

Email: muhammadaryanakd033@gmail.com¹, yadhi01@gmail.com², jumrianisemsi@gmail.com³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan Kode Pos 91112

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tudang Sipulung dan Partisipasi Anggaran terhadap munculnya Senjangan Anggaran pada Pemerintah Desa di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: Tudang Sipulung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyebab Senjangan Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Suppa. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan Tudang Sipulung yang berlandaskan pada asas *Getteng* (Kebenaran/ketegasan), *Lempu'* (Jujur), *Ada Tongeng* (Perkataan Benar), dan sifat *Sipakatau* (Saling Menghargai) merupakan ruang bagi masyarakat untuk mencermati dan mengoreksi konsep APBDes secara umum, namun untuk penganggaran terperinci dimana senjangan anggaran dapat terjadi bukan lagi menjadi bagian dari kegiatan *Tudang Sipulung*; Partisipasi Anggaran Memiliki pengaruh atau hubungan yang kuat dan signifikan terhadap terjadinya Senjangan Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Desa di Kecamatan Suppa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi partisipasi dalam penyusunan anggaran maka akan mempengaruhi potensi terjadinya senjangan anggaran, dan semakin banyak orang atau individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran maka akan semakin besar pula senjangan anggaran tersebut.

Kata kunci: *Tudang Sipulung*, Partisipasi Anggaran, Senjangan Anggaran

Abstract

This study aims to determine the effect of Tudang Sipulung and Budget Participation on the emergence of Budget Slack in Village Government in Suppa District, Pinrang Regency. The results obtained from this study include: Tudang Sipulung has a positive but not significant effect on causing Budget Slack in Budget Management by the Village Government in Suppa District. This can be interpreted that the Tudang Sipulung activity which is based on the principles of Getteng (Truth/assertiveness), Lempu' (Honest), Ada Tongeng (True Words), and the nature of Sipakatau (Mutual Respect) is a space for the community to observe and correct the concept of APBDes in general, but for detailed budgeting where budget slack can occur is no longer part of the activities of Tudang Sipulung; Budget Participation Has a strong and significant influence or relationship on the occurrence of Budgetary Slack in Village Budget Management in Suppa District. This can be interpreted that if participation in budgeting is high enough, it will affect the potential for budgetary slack, and the more people or individuals involved in the preparation of a budget will be able to increase the slack

Keywords: *Tudang Sipulung*, Budget Participation, Budgetary Slack

PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan potensi desa. Undang-undang ini juga merupakan bentuk penjabaran dari otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu poin penting dari implementasi undang-undang tersebut adalah pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan secara mandiri guna menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat [1]. Posisi desa kini lebih bersifat *self-governing community*, artinya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki peran dalam pembangunan ekonomi dan berwenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri [2]. Dalam Pasal 72 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa sumber keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta pendapatan sah lainnya [1].

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan profesional. Menekankan bahwa kepala desa wajib mengelola keuangan dan aset desa dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme [3]. Namun, realitas di lapangan menunjukkan berbagai permasalahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat empat masalah utama dalam pengelolaan keuangan desa, yakni:

1. belum lengkapnya regulasi teknis;
2. siklus anggaran yang tidak dipatuhi desa;
3. lemahnya pengawasan Inspektorat Daerah;
4. kelemahan sumber daya manusia (SDM) aparat desa [4].

Permasalahan tersebut diperkuat dengan data dari Lembaga *Anti Corruption Community* (ACC) yang mencatat 53 kasus penyalahgunaan anggaran desa selama 2018–2019 [5]. Di Kabupaten Pinrang, beberapa kasus juga mencuat seperti dugaan korupsi oleh Kepala Desa Mesakada dan sejumlah kepala desa lainnya [6][7]. Salah satu penyebab munculnya penyimpangan anggaran adalah praktik *budgetary slack* atau senjangan anggaran, yaitu perbedaan antara anggaran yang ditetapkan dengan estimasi terbaik, yang biasanya dilakukan secara sengaja [8]. Senjangan ini terjadi ketika pendapatan diestimasi lebih rendah dan biaya lebih tinggi [8]. Menambahkan bahwa *slack* sering terjadi karena kepentingan pribadi pelaksana anggaran [9].

Dalam sektor publik, *slack* dipahami sebagai bentuk perbedaan antara estimasi realistis dan jumlah anggaran yang diajukan. Tujuannya adalah agar anggaran lebih mudah dicapai, meski ini merusak integritas proses anggaran [10][11]. I Gede Mustika Yasa dkk. menyebut bahwa *slack* bisa muncul saat penyusunan anggaran dengan sengaja mengecilkan produktivitas dan melebihi permintaan sumber daya [3]. *Slack* sering terjadi saat individu dilibatkan dalam penyusunan anggaran dan cenderung melakukan *overestimate* biaya serta *underestimate* pendapatan [12].

Dari sudut pandang etika, menurut ahli mengklasifikasikan *slack* sebagai perilaku etis atau tidak etis, tergantung pada motifnya [12]. Muria menegaskan bahwa persoalan utama *slack* lebih pada integritas pelaku anggaran [13]. Etika dalam penyusunan anggaran menentukan apakah *slack* dipandang sebagai upaya antisipatif atau manipulatif. Menurut ahli menyatakan bahwa *slack* berdampak negatif karena menciptakan persepsi salah terhadap kinerja individu [14]. Hairil menyebut *slack* sebagai bentuk ketidakjujuran akibat penggelembungan anggaran [15]. Hal ini sejalan dengan Dharmanegara yang menyebut *slack* sebagai praktik estimasi pendapatan rendah dan biaya tinggi [16]. Pedoman Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa dari BPKP menguraikan enam tahap pengelolaan: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban [17]. Prinsip yang diusung adalah transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta ketertiban dan disiplin sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 [18].

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang dalam budaya masyarakat Bugis disebut dengan istilah *Tudang Sipulung*. Istilah ini berarti duduk bersama atau bermusyawarah dan mencerminkan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan kolektif [19]. *Tudang Sipulung* merupakan ruang publik demokratis yang menjembatani kepentingan rakyat dan pemerintah [20]. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa *Tudang Sipulung* menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa [21].

Peran partisipatif ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 yang menetapkan prinsip anggaran publik, yakni sesuai kewenangan, tepat waktu, transparan, partisipatif, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum [22]. Menurut ahli menambahkan bahwa partisipasi anggaran bertujuan agar hasil anggaran lebih objektif dengan melibatkan semua unsur, termasuk masyarakat [23]. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran bisa berdampak berbeda terhadap *slack*. Studi lain menyebut bahwa semakin tinggi partisipasi, potensi *slack* juga meningkat karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi [24]. Berbeda dengan itu, studi lain menemukan bahwa partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemunculan *slack* [25]. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dan *budgetary slack* masih menjadi perdebatan ilmiah dan memerlukan pengkajian lebih lanjut, khususnya dalam konteks lokal yang khas seperti budaya Bugis di Suppa, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana hubungan antara partisipasi anggaran dan *budgetary slack* dalam pengelolaan keuangan desa, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal seperti *Tudang Sipulung* dan integritas pengelola anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* pada desa-desa di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, serta menelaah bagaimana aspek sosial budaya lokal dapat memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan melalui pendekatan survey dan analisis deskriptif. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 8 (Delapan) Desa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Sesuai dengan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 110 orang, jika dibagi ke 8 (Delapan) Desa sebagai objek penelitian maka jumlah sampel setiap desa rata-rata 14 Orang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil analisis yang diperoleh dari input kuisioner dalam rangka pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Uji Validitas

		Budgetary Slack	Tudang Sipulung	Partisipasi Anggaran	Validitas
Pearson Correlation	Budgetary Slack	1.000	.280	.459	Valid
	Tudang Sipulung	.280	1.000	.416	
	Partisipasi Anggaran	.459	.416	1.000	
Sig. (1-tailed)	Budgetary Slack	.	.002	.000	Valid
	Tudang Sipulung	.002	.	.000	
	Partisipasi Anggaran	.000	.000	.	

Untuk memperoleh nilai r_{Tabel} dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung posisi nilai distribusi r_{Tabel} dengan menggunakan rumus berikut

$$df = (N-2) / \alpha = 0,05$$

Sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan maka dapat posisi nilai distribusi r_{Tabel} adalah sebagai berikut :

$$df = (N-2) / \alpha = 0,05 \text{ atau } df = (110-2) / \alpha = 0,05 = df = 108 / \alpha = 0,05$$

Nilai dari r_{Tabel} untuk $df = 108 / \alpha = 0,05$ sesuai dengan distribusi r_{Tabel} yakni : 0.1576

Sesuai dengan hasil perhitungan untuk r_{Tabel} dengan berpedoman pada distribusi r_{Tabel} yakni : 0.1576. Dasar pengambilan keputusan dalam membandingkan Nilai r_{Hitung} dengan Nilai r_{Tabel} , maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa nilai r_{Hitung} berdasar pada nilai *Pearson Correlation* setiap variabel sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.4 yakni antara 0,280-0,459 atau lebih besar dari nilai $r_{Tabel} = 0.1576$. Sehingga Input Data Kuisioner dapat dinyatakan Valid

Hasil analisis yang dituangkan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* untuk semua variabel yakni 0,000 – 0,002. Sesuai dengan dasar pengambilan untuk uji validitas dengan membandingkan Nilai *Sig. (2-tailed)* dengan Nilai $\alpha = 0,05$ dapat dinyatakan bahwa Nilai *Sig. (2-tailed)* maka dapat dinyatakan bahwa nilai Nilai *Sig. (2-tailed)* 0,000 – 0,002 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, maka hasil input data dapat dinyatakan Valid

Tabel 2 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.575	1.744		4.343	.000
	Tudang Sipulung	-.256	.136	.108	1.151	.252
	Partisipasi Anggaran	.866	.111	.414	4.411	.000

a. Dependent Variable: Kinerja

Mendukung salah satu dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial sehingga dapat diperoleh kesimpulan pengaruh antara variabel (X) dan Variabel (Y) yakni dengan memperbandingkan nilai t_{Tabel} dengan nilai t_{Hitung} , maka untuk mendapatkna nilai t_{Tabel} dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut :

$$t_{Tabel} = \alpha / 2 ; n - k - 1$$

Dimana

α = Nilai Signifikansi 0,05

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel

$$t_{Tabel} = 0,05 / 2 ; 110 - 3 - 1 = 0,025 ; 106$$

Hasil persamaan tersebut berdasarkan nilai yang tertuang pada distribusi t_{Tabel} yakni : 1.98238. Sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk uji hipotesis dengan menggunakan Uji

Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) maka terhadap masing-masing variabel dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) *Tudang Sipulung*

Dari hasil nilai persamaan $t_{Tabel} = 0,025$; 106 maka sesuai dengan tabel distribusi t_{Tabel} diperoleh nilai sebesar = 1.98238

Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai t_{Tabel} dan nilai t_{Hitung} untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara *Tudang Sipulung* terhadap timbulnya *Budgetary Slack*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa hasil yang diperoleh dari analisis menunjukkan bahwa nilai $t_{Hitung} = 1.151$ lebih kecil dari nilai $t_{Tabel} = 1.98238$. maka dapat dinyatakan bahwa *Tudang Sipulung* berpengaruh positif namun tidak memiliki hubungan terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Suppa

Sementara untuk melihat hasil perbandingan *Signifikansi* dari kedua variabel sesuai yang ditampilkan pada Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa *Nilai Signifikansi* (α) = 0,05 lebih kecil dari nilai signifikansi pada *Tudang Sipulung* yakni 0.252 sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai perbandingannya dikategorikan tidak signifikan.

Hasil pengujian yang diperoleh dari dasar pengambilan keputusan untuk uji parsial Hipotesis Pengaruh *Tudang Sipulung* terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Suppa, maka pernyataan untuk hasil analisis ini adalah *Tudang Sipulung* berpengaruh positif namun tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Suppa, sehingga dapat dikatakan bahwa Hipotesis diterima.

2) Partisipasi Anggaran

Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk uji parsial dengan membandingkan nilai t_{Tabel} dan nilai t_{Hitung} agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh antara Partisipasi Anggaran terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Suppa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa hasil yang diperoleh dari analisis menunjukkan bahwa nilai $t_{Hitung} = 4.411$, lebih besar dari nilai $t_{Tabel} = 1.98238$, maka untuk itu dapat dinyatakan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan memiliki hubungan terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Suppa

Sementara untuk melihat hasil perbandingan *Signifikansi* dari kedua variabel sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.8 dapat dinyatakan bahwa *Nilai Signifikansi* Partisipasi Anggaran yakni 0,000 lebih kecil dibanding dengan *Nilai Sig* (α) = 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai perbandingannya dikategorikan signifikan.

Hasil pengujian yang diperoleh dari dasar pengambilan keputusan untuk uji parsial Hipotesis Partisipasi Anggaran terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Suppa, dapat dinyatakan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan memiliki hubungan yang Signifikan terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Suppa, maka disimpulkan Hipotesis di Terima.

Dukungan dalam pengukuran uji simultan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan tersebut, maka dibutuhkan nilai F_{Tabel} sebagai pembanding dalam melihat apakah semua variabel indeviden mampu mempengaruhi variabel dependen. Adapun dasar untuk mendapatkan nilai F_{Tabel} persamaan yang dapat digunakan yakni :

$$df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$df_2 = n - k = 110 - 3 = 107$$

Hasil persamaan tersebut menunjukkan bahwa pada distribusi F_{Tabel} nilai $df_1 = 2$ dan nilai $df_2 = 107$, sehingga hasil yang diperoleh yakni $F_{Tabel} = 3,08$

Tabel 3 Analisis Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	104.180	2	52.090	15.122	.000 ^b
1 Residual	368.584	107	3.445		
Total	472.764	109			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Kepuasan, Penempatan

Sesuai dengan Nilai F_{Hitung} yang telah diperoleh yakni 3,08, sementara nilai F_{Hitung} sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3, maka pernyataan yang dapat dibuat adalah Nilai $F_{Hitung} = 15.122$ Lebih besar dari Nilai $F_{Tabel} = 3,08$.

Maka dapat disimpulkan bahwa *Tudang Sipulung* dan *Partisipasi Anggaran* jika secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan hubungan yang sangat kuat terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Suppa. Uji *Signifikansi* $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari analisis uji simultan adalah 0,000 dan lebih kecil dari Signifikansi $\alpha = 0,05$.

Sehingga hal ini membuktikan bahwa terdapat hasil perbandingan yang sangat signifikan. Kesimpulan dari hasil Uji Simultan atau Uji F ini adalah Variabel *Tudang Sipulung* dan *Partisipasi Anggaran* secara bersama-sama memiliki berpengaruh positif dan memiliki hubungan yang signifikan terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Suppa.

Pembahasan

1. *Tudang Sipulung* berpengaruh positif namun tidak memiliki Hubungan yang Signifikan terhadap terjadinya Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*) dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Suppa.

Tudang Sipulung sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya sebagaimana dikemukakan dalam penelitiannya memberikan pengertian bahwa secara harfiah berdasarkan pola tata bahasa *Lontarak Bugis* merupakan penggalan kata *Tudang* (Duduk) dan *Sipulung* (Berkumpul) atau dapat dijabarkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan permusyawaratan guna membicarakan hal-hal yang terkait dengan kondisi sosial di masyarakat, umumnya kegiatan [27].

Sementara jika ditinjau dari sudut pandang sosial politik pemerintahan dapat diartikan sebagai ruang publik (rakyat) untuk menyuarakan kepentingannya guna menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi dengan kata lain *Tudang Sipulung* merupakan ruang yang dapat menjembatani antara kepentingan publik dan pemerintah (penguasa) karena berlangsung berdasarkan prinsip demokrasi. Penjabaran tersebut memberikan penegasan bahwa dalam pengelolaan Anggaran Desa yang dilaksanakan oleh setiap Desa di Kecamatan Suppa secara umum dapat dinyatakan telah terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuannya, dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginannya terhadap pemanfaatan Anggaran Desa dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam bidang perekonomian masyarakat.

Tudang Sipulung sesuai dengan maknanya adalah wadah berhimpun bagi masyarakat atau dapat pula dikatakan sebagai mimbar dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sehingga peran dari masyarakat pada konsep *Tudang Sipulung* tidak pada tatanan untuk menentukan nilai anggaran untuk sebuah kegiatan, namun lebih kepada melakukan pencermatan terhadap kesesuaian dari anggaran yang diajukan oleh Perangkat Desa.

Penegasan yang sama juga disampaikan oleh studi lain bahwa kegiatan *Tudang Sipulung* adalah mimbar bagi masyarakat dimana melalui kegiatan ini mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya dengan tetap menjaga nilai-nilai *Lempu'* (Jujur), *Ada Tongeng* (Perkataan yang Benar), dan *Sipakatau* (Saling Menghargai) [21].

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa *Tudang Sipulung* pada dasarnya tidak memiliki hubungan terhadap terjadinya *slack* dalam anggaran, dan pernyataan tersebut menguatkan hasil penelitian yang dilakukan studi lain bahwa *Tudang Sipulung* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran [27].

Namun persepsi yang dibangun dalam penelitian ini berbeda dengan sudut pandang yang dikemukakan studi lain yang mempersepsikan bahwa pelibatan masyarakat tidak menjadi prioritas karena pada akhirnya perangkat pemerintahan yang akan menentukan atau memilih apa keputusan program yang akan dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa adanya keterlibatan masyarakat program yang dituangkan dalam konsep penganggaran tetap berjalan [26]. Sedangkan dalam penelitian ini melihat dari sudut pandang kewenangan dengan berdasar pada Undang-Undang Desa, dimana kewenangan dalam penyusunan anggaran adalah bagian dari Tugas dan Fungsi Aparatur Desa, sementara jangkauan fungsi dari kegiatan *Tudang Sipulung* adalah wujud partisipasi masyarakat untuk mengajukan pendapat dalam rangka menyuarakan kebutuhan akan kebutuhan Sarana dan Prasarana serta peran mereka pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Kekhawatiran yang dipersepsikan juga menjadi pertimbangan dari studi lain bahwa konsep timbulnya *budgetary slack* dalam pengelolaan anggaran sektor publik sering terjadi pada saat perencanaan anggaran dilakukan, dimana ketika individu-individu dilibatkan dalam pembuatan anggaran akan cenderung meng-*overestimate*-kan *cost* atau meng-*underestimate*-kan *revenue* [27],

[12].

Kondisi tersebut juga disampaikan oleh penelitian lain dalam hasil penelitiannya bahwa peluang timbulnya *budgetary slack* dalam penganggaran sektor publik dikarenakan pada kegiatan penganggaran (mulai dari klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan) melibatkan seluruh pelaksana yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) [28].

Timbulnya *Slack* pada pengelolaan dan pelaksanaan anggaran termasuk dalam perencanaan kegiatan melalui Anggaran Desa salah satu faktor penyebabnya adalah etika dari pengelola anggaran, sebagaimana diuraikan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *budgetary slack* adalah etika atau moral dengan mengkategorikannya dari sudut pandang perilaku positif (etis) dan negatif (non etis) [12]. Sehingga merujuk pada konsep perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Desa tentunya tidak dilakukan oleh orang perorang, melainkan melibatkan beberapa unsur didalamnya seperti Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa dan juga Sekretaris Desa, dengan demikian konsep yang dibangun juga masih dalam domain *Tudang Sipulung* sesuai dengan pengertian yang disampaikan mengutip sebuah *Pappaseng* dari Kajao Laliddong yakni [20]:

“... *Naiyya riyasenge tudang sipulung, iyyanaritu mallari ade'e napogau toriolota'. Tudang maddeppu-deppungeng, tudang mallewo-lewoang nasibawai akkatta maelo sipatangngareng nenniya maelo mala ada assimaturuseng*”.

Artinya :

“... yang dimaksud dengan *tudang sipulung* adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh nenek moyang (tetua/penghulu adat) sejak dahulu. *Tudang sipulung* adalah duduk berkumpul dengan tujuan hendak melakukan musyawarah agar dapat mencapai sebuah kemufakatan”

Konsep inilah yang seharusnya dapat dibangun dalam memaknai *Tudang Sipulung*, dimana untuk menghindari terjadinya *slack* khususnya dalam perencanaan anggaran maka semua unsur tentunya harus berpegang teguh pada makna yang ada dalam *Tudang Sipulung* yakni *Lempu'* (Jujur), *Ada Tongeng* (Perkataan yang Benar), dan *Sipakatau* (Saling Menghargai).

Hanya saja konsep *Tudang Sipulung* selama ini dikonotasikan hanya pada tatanan berhimpunnya masyarakat pada sebuah kegiatan tertentu. sehingga fungsi kontrol yang semestinya dimiliki oleh masyarakat menjadi berkurang dan hal inilah yang menjadi salah satu faktor banyaknya timbul permasalahan dalam pengelolaan Anggaran Desa.

2. Partisipasi Anggaran Memiliki Pengaruh dan hubungan signifikan yang kuat terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran Desa di Kecamatan Suppa.

Partisipasi anggaran sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh ahli adalah pendekatan penganggaran yang memungkinkan para pengelola anggaran yang akan bertanggungjawab atas kinerja anggaran untuk berpartisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggung jawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas [29].

Peran dari unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan anggaran tentunya akan sangat berpengaruh terhadap permasalahan senjangan anggaran atau *budgetary slack*. Walaupun *slack* dalam pengelolaan anggaran dapat dibenarkan akan tetapi dengan adanya peluang tersebut oleh beberapa ahli menunjukkan kekhawatirannya terhadap penyalahgunaan dari fungsi *slack* pada anggaran, sebagaimana dikemukakan ahli bahwa kesenjangan anggaran dapat memberikan dampak negatif karena menimbulkan potensi agar anggaran mudah dicapai dan menciptakan persepsi yang salah dari kinerja individu yang terlibat [14]. Sementara menurut studi lain menyatakan bahwa timbulnya *budgetary slack* disebabkan karena adanya perilaku disfungsi bahkan tidak jujur yang disebabkan adanya penggelembungan anggaran yang dilakukan secara sengaja oleh pihak pengelola [21].

Pernyataan-pernyataan tersebut sejalan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya kesenjangan anggaran atau *budgetary slack* khususnya pada pengelolaan anggaran desa, dimana dipersepsikan bahwa semakin banyaknya unsur yang terlibat dalam penyusunan anggaran maka kepentingan dari masing-masing unsur akan sangat mempengaruhi dalam penentuan anggaran yang akan disusun. Hasil analisis ini tentunya menguatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh studi lain bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan pengelolaan anggaran desa [9]. Hal ini diartikan bahwa apabila partisipasi dalam penyusunan anggaran cukup tinggi maka akan berpengaruh terhadap potensi terjadinya *budgetary slack*, serta semakin banyak orang atau individu yang terlibat dalam penyusunan suatu anggaran akan dapat meningkatkan *slack* tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa *slack* pada anggaran adalah sebuah kebutuhan, hal ini

dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya lonjakan harga dipasaran, selain itu adanya *slack* juga dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang diluar dugaan, hanya saja dari beberapa persepsi memberikan gambaran bahwa terkadang oleh unsur-unsur pengelola anggaran sering bersikap disfungsi atau tidak lagi berorientasi pada tujuan utama yang akan dicapai.

3. *Tudang Sipulung* dan Partisipasi Anggaran secara bersama-sama memiliki pangaruh positif dan hubungan yang kuat dan signifikan terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran Desa di Kecamatan Suppa.

Tudang Sipulung dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung didalamnya yakni sifat *Getteng* (Keteguhan/ Ketegasan), *Lempu'* (Jujur), *Ada Tongeng* (Perkataan yang Benar), dan sifat *Sipakatau* (Saling Menghargai) jika dijadikan sebagai dasar oleh penyelenggara pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran tentunya akan dapat memberikan dampak positif terhadap permasalahan *slack* pada anggaran desa.

Keberadaan kegiatan *Tudang Sipulung* yang dipersepsikan sebagai filter bagi pengelola anggaran desa dalam penyusunan anggaran tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintahan desa untuk dapat menyusun anggaran dengan estimasi sebaik mungkin. Sehingga munculnya *slack* yang berlebihan akan dapat dihindari atau dengan kata lain jikapun terdapat *slack* pada anggaran yang disusun mampu dipersepsikan kepada masyarakat dengan alasan yang logis.

Menghindari terjadinya sifat disfungsi dari pengelola anggaran desa maka dalam penyusunan anggaran tentunya harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa maka peran masyarakat sangatlah penting. Munculnya beberapa permasalahan pada pengelolaan Anggaran Desa diberbagai tempat, hal ini lebih didasarkan pada perilaku disfungsi dari aparat pemerintah desa, selain itu fungsi kontrol dari masyarakat tidak berjalan secara optimal.

Hasil analisis dari penelitian ini mempersepsikan bahwa *Tudang Sipulung* dan Partisipasi Anggaran jika secara bersama-sama memiliki pangaruh positif dan hubungan yang kuat dan signifikan terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran Desa di Kecamatan Suppa, dapat dipersepsikan bahwa dengan adanya prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan *Tudang Sipulung* tentunya sangat berdampak pada munculnya perilaku disfungsi sehingga dapat menimbulkan *slack* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran.

Dampak yang dimaksudkan bahwa semua unsur baik yang terlibat dalam kegiatan *Tudang Sipulung* maupun dalam Penyusunan Anggaran jika menjadikan prinsip-prinsip *Getteng* (Keteguhan/ Ketegasan), *Lempu'* (Jujur), *Ada Tongeng* (Perkataan yang Benar), dan sifat *Sipakatau* (Saling Menghargai) maka munculnya *slack* dalam pengelolaan anggaran secara berlebihan akan dapat dihindari.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Pengaruh *Tudang Sipulung* Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*) Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. *Tudang Sipulung* berpengaruh positif namun tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap terjadinya Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*) dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Suppa. Hal ini dapat diartikan bahwa Kegiatan *Tudang Sipulung* yang didasari pada prinsip *Getteng* (Keteguhan/ Ketegasan), *Lempu'* (Jujur), *Ada Tongeng* (Perkataan yang Benar), dan sifat *Sipakatau* (Saling Menghargai) merupakan ruang bagi masyarakat dalam melakukan pencermatan dan juga mengoreksi konsep APBDes secara umum, namun terhadap penyusunan anggaran secara detail dimana *slack* anggaran dapat terjadi tidak lagi menjadi bagian dari kegiatan *Tudang Sipulung*.
2. Partisipasi Anggaran Memiliki Pangaruh atau hubungan yang kuat dan signifikan terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran Desa di Kecamatan Suppa. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila partisipasi dalam penyusunan anggaran cukup tinggi maka akan berpengaruh terhadap potensi terjadinya *budgetary slack*, serta semakin banyak orang atau individu yang terlibat dalam penyusunan suatu anggaran akan dapat meningkatkan *slack* tersebut.
3. *Tudang Sipulung* dan Partisipasi Anggaran secara bersama-sama memiliki pangaruh positif dan hubungan yang kuat dan signifikan terhadap terjadinya *Budgetary Slack* dalam Pengelolaan Anggaran Desa di Kecamatan Suppa. Hal ini dapat diartikan bahwa jika dalam pengelolaan anggaran desa prinsip-prinsip dasar yang ada dalam makna *Tudang Sipulung* juga dijadikan sebagai landasan pada penyusunan anggaran, maka kekhawatiran terjadinya *slack* akibat perilaku disfungsi aparat pemerintah desa dapat dihindari.

Saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh antara lain :

1. Untuk menghindari terjadinya *slack* pada anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran, maka disarankan kepada pemerintahan desa untuk menetapkan standar harga yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun anggaran .
2. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pengelolaan anggaran desa, maka kegiatan *tudang sipulung* dapat dijadikan sebagai sebuah rutinitas dari pemerintahan desa dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan anggaran desa. .Bahwa untuk dapat menjaga keseimbangan dan agar terhindar dari dampak hukum terhadap adanya *slack* anggaran, maka semua kebijakan yang disusun oleh pemerintah desa ditetapkan melalui forum *tudang sipulung*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [2] Hadi, S. (2020). *Konstruksi Pembangunan Desa dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [3] Yasa, I. G. M., Santosa, I. G. M., & Dewi, N. P. S. R. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 16(2), 123–135.
- [4] Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: KPK RI.
- [5] ACC (Anti-Corruption Community). (2019). *Laporan Tahunan Kasus Korupsi Desa 2018–2019*.
- [6] Tribun-Timur. (2023, Mei 30). Kepala Desa di Pinrang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa. Diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/>
- [7] Celebes. (2023, Juni 15). Kasus Dugaan Korupsi di Desa Mesakada Pinrang Naik ke Penyidikan. Diakses dari <https://celebes.co/>
- [8] Elhanna, A., & Taouab, O. (2015). Budgetary Slack and Managers' Characteristics: Empirical Study. *Procedia Economics and Finance*, 23, 515–520.
- [9] Musawir, U. (2021). Anggaran Desa dan Potensi Budgetary Slack: Perspektif Pengawasan Internal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Desa*, 5(1), 55–66.
- [10] Lukman, L. (2019). Hubungan Partisipasi Anggaran dan Budgetary Slack pada Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 287–297.
- [11] Ratri, S. A. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Budgetary Slack dengan Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 13–28.
- [12] Yuhertiana, I. (2011). Etika dan Slack Anggaran. *Jurnal Etika & Profesi Akuntansi*, 1(1), 1–11.
- [13] Muria, R. (2019). Integritas Penyusun Anggaran dan Pengaruhnya terhadap Budgetary Slack. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 133–141.
- [14] Chong, V. K., & Khudzir, W. M. R. (2018). Budgetary Slack and Ethical Perceptions: Evidence from Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 26(3), 391–407.

- [15] Hairil, H. (2020). Pengaruh Etika dan Asimetri Informasi terhadap Terjadinya Budgetary Slack. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(2), 45–58.
- [16] Dharmanegara, I. B. A. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Budgetary Slack dengan Self Esteem sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 1997–2024.
- [17] BPKP. (2021). Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- [18] Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [19] La'lang, A. (2020). Budaya Tudang Sipulung dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa. *Jurnal Antropologi Budaya*, 8(1), 55–65.
- [20] Baharuddin, A. (2016). Tudang Sipulung: Praktik Demokrasi Lokal Masyarakat Bugis. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(1), 145–160.
- [21] Wiskawandi, H. (2020). Peran Tudang Sipulung dalam Pengawasan Anggaran Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Desa*, 3(2), 70–81.
- [22] Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD.
- [23] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- [24] Khasanah, S. N. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Budgetary Slack: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(1), 65–78.
- [25] Badriah, E. (2020). Analisis Partisipasi Anggaran terhadap Budgetary Slack di Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 29–37.
- [26] Yadi Arodhiskara, et.al. 2021. The influence of Tudang Sipulung, public accountability, and transparency to the regional budget performance of the municipality of Parepare. *Universitas Muhammadiyah Parepare, Management Science Letters* 11 (2021) 49–56.
- [27] Kurniawaty dan Yadi Arodhiskara, 2021. Pengaruh Tudang Sipulung dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Daerah. Program Pasca Sarjana, STIE Amkop Makassar. <https://jurnal.ilrscentre.or.id/index.php/mars/article/view/2>
- [28] Elis Badriah, 2020. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran). Universitas Galuh, Ciamis. *Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020, ISSN: 2442-3777
- [29] Hansen & Mowen, 2013. *Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat. Jakarta
- [30] Idrus, I., Fitriani, A., & Hajriana, H. (2021). Analysis of Personality and Local Culture: The Effect on Employee Performance. *UNEJ e-Proceeding*, 6-11.
- [31] Dewi, Y., Fajar, A. M., Sampara, N., & Idrus, I. (2024). Analysis of Marketing Strategies in Enhancing Competitive Advantage in the E-Commerce Industry in the Banking Sector. In *IECON: International Economics and Business Conference* (Vol. 2, No. 2, pp. 854-865).